

MATERI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

MAKALAH

Disajikan dalam Kegiatan Penyuluhan Materi Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) bagi Guru-Guru TPA yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Al-Quran Ranting Cimenyan, Tanggal 30 November 2009

Oleh:
Miftahul Falah, S. S., M. Hum.

IKATAN GURU
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN
RANTING CIMENYAN
2009

Materi Sejarah Kebudayaan Islam*

Oleh:

Miftahul Falah, S. S., M. Hum.

(Asisten Ahli di Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Unpad)

Pengantar

Suatu malam, anak tunggal penulis bertanya, “Ayah, tolong belikan buku tentang riwayat para nabi karena Kakak (sebutan guru di TPA) memberiku tugas menghafal riwayat para nabi sebagai pekerjaan pelajaran SKI”. Keesokan harinya, saya pergi ke toko buku membeli buku tersebut dan sesampainya di rumah buku itu langsung dibaca oleh anak saya. Ketika ia mulai bisa memahami isi buku tersebut, saya mulai sadar apakah yang dimaksud dengan pelajaran SKI itu?

Saya langsung mencari tahu dari daftar pelajaran yang diberikan TPA tempat anak saya belajar *ngaji*. Tidak lama kemudian saya tertegun karena ternyata SKI itu adalah Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, saya tertegun karena dalam pikiran saya timbul pertanyaan, apakah perjuangan para nabi dalam menyebarkan ajaran Islam masuk ke dalam ranah Sejarah Kebudayaan Islam? Bukankah kebudayaan itu “diciptakan” oleh manusia sedangkan Islam langsung diturunkan Tuhan YME? Artinya, apakah tepat kalau perjuangan para nabi dalam menyebarkan ajaran Islam dijadikan sebagai materi pelajaran SKI?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan kepada salah seorang TPA yang kebetulan tempat tinggalnya tidaklah begitu jauh dari rumah penulis.

* Disajikan dalam kegiatan Penyuluhan Materi Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) bagi Guru-Guru TPA yang diselenggarakan tanggal 30 November 2009 di TPA Baiturrahman.

Apa yang saya ketahui mengenai batas Sejarah Islam dan Sejarah Kebudayaan Islam, didiskusikan bersama yang pada akhirnya lahir kesepakatan untuk mengkaji masalah tersebut lebih meluas. Artinya, apa yang kami diskusikan tersebut perlu diketahui oleh para guru TPA/TKA agar mereka memiliki pengetahuan yang benar mengenai materi SKI. Berkaitan dengan itu, Kepala TPA tersebut menyampaikan gagasan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan bagi para guru tentang materi Sejarah Kebudayaan Islam. Tujuannya agar materi SKI tidak bercampur dengan materi Sejarah Islam.

Pengertian Sejarah Kebudayaan Islam ?

Sebelum kita memahami pengertian Sejarah Kebudayaan Islam, ada beberapa konsep keilmuan yang harus kita pahami, yaitu arti sejarah dan kebudayaan. Jadi, pertama-tama kita harus menjawab terlebih dahulu pertanyaan apakah sejarah itu? Kemudian kita pun mesti menjawab apakah kebudayaan itu? Jawaban kedua pertanyaan itu akan mengarahkan kita pada pemahaman arti sejarah kebudayaan. Kata Islam yang mengikuti sejarah kebudayaan akan mempersempit pengertian dari sejarah kebudayaan karena dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan keislaman.

Konsep paling mendasar dari pengertian sejarah adalah tentang masa lampau sehingga konsep tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi. Akan tetapi, masa lampau itu perlu dibatasi dengan mengajukan pertanyaan *sejak kapan* yang melahirkan konsensus bahwa masa lampau dianggap sebagai sejarah ketika di

suatu masyarakat telah ditemukan bukti-bukti tertulis¹; dan *sampai apabila* yang berkaitan erat dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang dimaksud adalah pemilihan peristiwa di masa lampau yang memiliki relevansi dengan penelitian sejarah yang sedang dilakukan. Artinya, kejadian kemarin bisa dianggap sebagai bagian dari penelitian sejarah, apabila kejadian itu dilihat dari perspektif proses yang sedang berjalan. Pembatasan waktu pun berkaitan dengan penggalan-penggalan waktu yang kemudian lebih dikenal dengan periodisasi. Periodisasi merupakan suatu kesatuan tertentu yang telah ditentukan secara konvensional dan diterima umum. Namun demikian, adakalanya seorang sejarawan menentukan sendiri periodenya yang disesuaikan dengan sasaran dari penelitian sejarah. Secara teoretis, karakteristik yang dominan melandasi pemenggalan waktu atau periode yang dibuat oleh sejarawan.²

Sampai di sini, kita bisa merumuskan pengertian sejarah sebagai peristiwa yang terjadi di masa lampau. Akan tetapi, apa saja yang dimaksud dengan peristiwa itu? Apakah semua peristiwa, yang penting terjadi di masa lampau, itu termasuk sejarah? Ternyata tidak, karena kecenderungan umum menyatakan bahwa hanya tindakan dan perilaku manusia yang menjadi pusat perhatian sejarah. Tindakan dan perilaku merupakan suatu kesengajaan yang

¹ Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo (eds.). 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia. Hlm. ix.

² Ada empat hal yang terjadi dalam waktu, yaitu: **pertama**, perkembangan yang terjadi apabila secara berturut-turut masyarakat bergerak dari bentuk masyarakat sederhana ke arah masyarakat yang lebih kompleks; **kedua**, kesinambungan terjadi apabila lembaga-lembaga lama diadopsi oleh masyarakat baru; **ketiga**, pengulangan terjadi apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi; dan **keempat**, perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran yang terjadi secara besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Lebih lanjut lihat Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. Hlm. 14-16.

dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, perhatian sejarah bukan terhadap “peristiwa”, melainkan terhadap suatu perbuatan atau tindakan yaitu “peristiwa yang disengaja”. Di luar itu, seperti peristiwa alam, dipandang sebagai peristiwa yang berfungsi sebagai salah satu kekuatan yang bisa ikut mempengaruhi “peristiwa yang disengaja” itu.

Pertanyaan lain muncul, apakah semua tindakan dan perilaku manusia di masa lampau itu merupakan peristiwa sejarah? Jika jawabannya “ya”, maka sejarah belumlah memiliki batasan yang sesungguhnya. Menghadirkan kembali setiap tindakan dan perilaku manusia di masa lampau secara mendetail tidaklah mungkin dilakukan, kecuali terjadi di alam mimpi. Mengapa demikian? Di mana pun tidak akan ada catatan, ingatan, atau benda yang sanggup merekam setiap detail dari tindakan dan perilaku manusia di masa lampau. Jadi, kalau *total history* dalam arti di atas, tidaklah mungkin dilakukan oleh sejarawan sekaliber apapun. Selain itu, tempat pun menjadi salah satu batasan dalam melakukan penelitian sejarah. Dari batasan sederhana yang telah dilakukan, secara praktis dan metodologis, sejarah dapat diartikan sebagai **tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu di masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu.**³

Pada dasarnya, para sejarawan sepakat dengan pendapat Taufik Abdullah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa sejarah merupakan usaha rekonstruksi terhadap peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Secara etimologis, kata sejarah diyakini diambil dari bahasa Arab ‘*syajarah*’ yang berarti

³ Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo (eds.). *op.cit.* Hlm. xx.

pohon atau silsilah. Maknanya tertuju pada makna padanan *tarik*, babad, mitos, legenda, dan lain-lain.⁴ Dalam kitabnya yang berjudul *al-Muqaddimah*, Ibn Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan umat manusia atau peradaban dunia; tentang perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat; tentang revolusi; tentang kerajaan dan negara; serta berbagai perubahan lainnya yang terjadi di masyarakat.⁵

Ada juga yang mendefinisikan sejarah sebagai peristiwa masa lampau yang tidak hanya sekadar memberi informasi tentang terjadinya peristiwa itu, tetapi juga memberi interpretasi atas peristiwa yang terjadi dengan melihat pada hukum sebab akibat.⁶ Dengan demikian, suatu peristiwa akan mengakibatkan peristiwa lain dan rangkaian dari peristiwa itulah yang disebut dengan sejarah. Dari uraian tersebut dikatakan bahwa sejarah memiliki tiga makna, seperti yang dikatakan oleh Mohammad Ali, yaitu (1) sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa secara riil di lingkungan suatu masyarakat; (2) cerita tentang sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa secara riil di lingkungan suatu masyarakat tersebut; dan (3) ilmu yang bertugas meneliti sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa secara riil di lingkungan suatu masyarakat tersebut.⁷

Konsep kedua yang perlu kita pahami adalah apakah kebudayaan itu? Untuk memahami pengertian dan hakikat kebudayaan, saya ringkaskan pendapat

⁴ Lihat lebih lanjut Sidi Gazalba. 1981. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bhratara. Hlm. 11; Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya. Hlm. 51; Misri A. Muchsin. 2002. *Filsafat Sejarah dalam Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. Hlm. 17-22.

⁵ Ibn Khaldun. 1986. *Mukaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus. Hlm. 12-13; bandingkan dengan Misri A. Muchsin. *op. cit.* Hlm. 19-20.

⁶ Nouruzzaman Shiddiqie. 1983. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Nurcahaya. Hlm. 5.

⁷ Mohammad Ali. 1963. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Jakarta: Bhratara. Hlm. 7-8.

C. A. Van Peursen yang terdapat dalam *Strategi Kebudayaan*.⁸ Pada awal perkembangannya, kebudayaan diartikan sebagai manifestasi dari kehidupan manusia yang berbudi luhur dan yang bersifat rohani. Ciri utama pemikiran tersebut adalah diciptakannya dikotomi masyarakat atau bangsa yang dikaitkan dengan kebudayaan itu sendiri. Maka, dikenallah **bangsa-bangsa berbudayaan** dan **bangsa-bangsa alam**. Kelompok pertama dipandang memiliki kebudayaan yang tinggi atau memiliki peradaban, sedangkan kelompok masyarakat kedua dipandang lebih primitif.

Akan tetapi, dalam perkembangannya terjadi pergeseran pemikiran atas hakikat kebudayaan. Kebudayaan dipandang secara lebih humanistik sehingga diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang atau setiap masyarakat (bangsa). Oleh karena itu, berdasarkan pemikiran tersebut dikotomi masyarakat beradab dan masyarakat primitif dihilangkan dan sebagai gantinya dikatakan bahwa setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan. Kebudayaan tidak hanya milik masyarakat maju, tetapi juga milik masyarakat terbelakang. Jadi, kebudayaan adalah milik setiap masyarakat. Pemikiran tersebut dilandasi oleh suatu gagasan bahwa di mana pun manusia hidup, secara anatomis ia memiliki tubuh yang sama. Manusia secara anatomis tidak akan mampu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Hal tersebut berbeda dengan hewan yang ketika diciptakan oleh Tuhan, pada tubuhnya telah dilengkapi peralatan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Oleh karena manusia tidak memiliki peralatan sebagaimana yang dimiliki oleh hewan, maka manusia menjadikan kebudayaan sebagai peralatan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya.

Selain itu, kebudayaan pun dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, bukan sesuatu yang bersifat statis. Dulu, kebudayaan dipandang kumpulan hasil kreasi manusia, seperti kesenian, gedung, buku, tradisi, dan sebagainya. Sekarang, kebudayaan dipandang sebagai kegiatan manusia yang membuat alat dan senjata, tata upacara kematian dan mantra-mantra untuk menentramkan roh jahat, cara

⁸ Lihat lebih lanjut C. A. van Peursen. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Terj. Dick Hartoko. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 9-17.

mendidik anak di keluarga, cara memperlakukan anggota masyarakat, dan sebagainya. Jadi, lebih dinamis karena kegiatan manusia itu sudah barang tentu mengandung makna perubahan. Tradisi memang sangat terkait dengan kebudayaan karena tradisi diterjemahkan sebagai pewarisan atau penerusan norma-norma. Akan tetapi, bukan berarti tradisi itu tidak bisa diubah. Justru karena tradisi itu dibuat oleh manusia, ia berhak untuk menerima, menolak, atau mengubahnya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mudah dipahami bahwa kebudayaan itu merupakan sebuah cerita tentang perubahan-perubahan: riwayat manusia yang selalu memberi wujud baru kepada pola-pola kebudayaan yang sudah ada.

Materi Sejarah Kebudayaan Islam

Nah, sekarang kita mengajukan pertanyaan apakah riwayat para nabi yang diutus oleh Allah SWT merupakan bagian dari Sejarah Kebudayaan Islam? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kita lihat klasifikasi materi Sejarah Kebudayaan Islam yang dikemukakan oleh 'Abdul Mun'im Majib. Menurut penulis buku *Sejarah Kebudayaan Islam* itu, materi Sejarah Kebudayaan Islam dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu sistem politik, masyarakat, dan peradaban.⁹

1. Sistem Politik

Sistem politik menurut kaca mata Sejarah Kebudayaan Islam meliputi beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, bagaimana kekuasaan dijalankan oleh negara berdasarkan aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Hukum Islam menempati urutan pertama dalam sistem

⁹ Lihat lebih lanjut 'Abdul Mun'im Majib. 1997. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Terj. Ahmad Rofi' Usmani. Bandung: Pustaka.

politik karena tegaknya suatu kebudayaan akan sangat ditentukan oleh tegaknya tidak sistem hukum atau konstitusi. Pada kenyataannya, kebudayaan Islam yang didukung oleh masyarakat muslim dapat berkembang karena berada di bawah naungan hukum Islam yakni konstitusi yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Perlu ditegaskan bahwa kedua sumber tersebut bukanlah hasil dari suatu kebudayaan karena keduanya bukan ciptaan manusia. Yang menjadi kebudayaan adalah sejauhmana masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Media yang dijadikan alat untuk mengimplementasikan hukum Islam yang diciptakan oleh manusia merupakan bagian dari kebudayaan Islam.

Untuk menegakan hukum Islam, sudah barang tentu dibutuhkan perlindungan dari para penguasa. Di Eropa dan belahan dunia lainnya, para penguasa tersebut dikenal dengan nama raja, ratu, atau kaisar. Berbeda dengan di dunia Islam, kekuasaan dipegang oleh khalifah karena konsep kekuasaan dalam Islam merupakan amanah dari Allah SWT. Seorang khalifah bukanlah penguasa mutlak karena ia merupakan pengganti Nabi Muhammad SAW untuk menegakan hukum Islam. Seorang khalifah tidak dipilih oleh penguasa sebelumnya, namun dipilih oleh para ulama terkemuka. Sistem khalifah pertama kali digagas di rumah Bani Sa'idah karena Rasulullah SAW tidak meninggalkan wasiat mengenai penggantinya. Selain itu, kedudukan Nabi yang bisa diganti adalah kedudukannya sebagai pemimpin sosial-politik bukan kedudukannya sebagai nabi.

Pada awal perkembangannya, sistem khalifah ini dapat diterapkan oleh empat orang sahabat Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini kemudian dikenal dengan sebutan *Khulafaur Rasyidin* atau para khalifah terpilih. Ya, mereka menjadi khalifah karena dipilih oleh kaum muslimin sehingga keempatnya tidak mewarisi jabatan dari khalifah sebelumnya. Mereka pun tidak mewariskan jabatan khalifah kepada penggantinya. Lebih dari itu, mereka pun tidak mempersiapkan penggantinya jika suatu saat mereka meninggal dunia.

Akan tetapi, sistem kekhalifahan yang ditegakkan oleh keempat sahabat Nabi tersebut tidak diteruskan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Sejak ia memegang jabatan khalifah, sistem kekhalifahan yang diterapkan di dunia Islam diganti dengan sistem kerajaan meskipun namanya masih tetap kekhalifahan dan penguasanya disebut khalifah. Jelas kedua sistem ini menunjukkan perbedaan mendasar, salah satunya adalah dalam sistem kerajaan, kekuasaan diwariskan kepada anaknya. Akibatnya, seorang putra mahkota yang masih kecil akan menjadi khalifah meskipun ia belum memenuhi syarat sebagai khalifah yakni berpengetahuan luas, mampu memimpin, berwawasan baik, sehat rohani dan jasmani, serta menguasai Al-Quran dan Hadits Nabi.¹⁰ Nah, sejak saat itu, masyarakat muslim mulai mengenai kekuasaan yang terpusat dari satu keturunan, antara lain Bani Umayyah, Abassiyah, Fatimiyah, dan sebagainya.

Hal lain yang perlu diketahui adalah ketidakseragaman dalam memakai gelar jabatan sebagai khalifah. Di antara khalifah yang masuk ke dalam golongan

¹⁰ 'Abdul Mun'im Majib. *Ibid.* Hlm. 15.

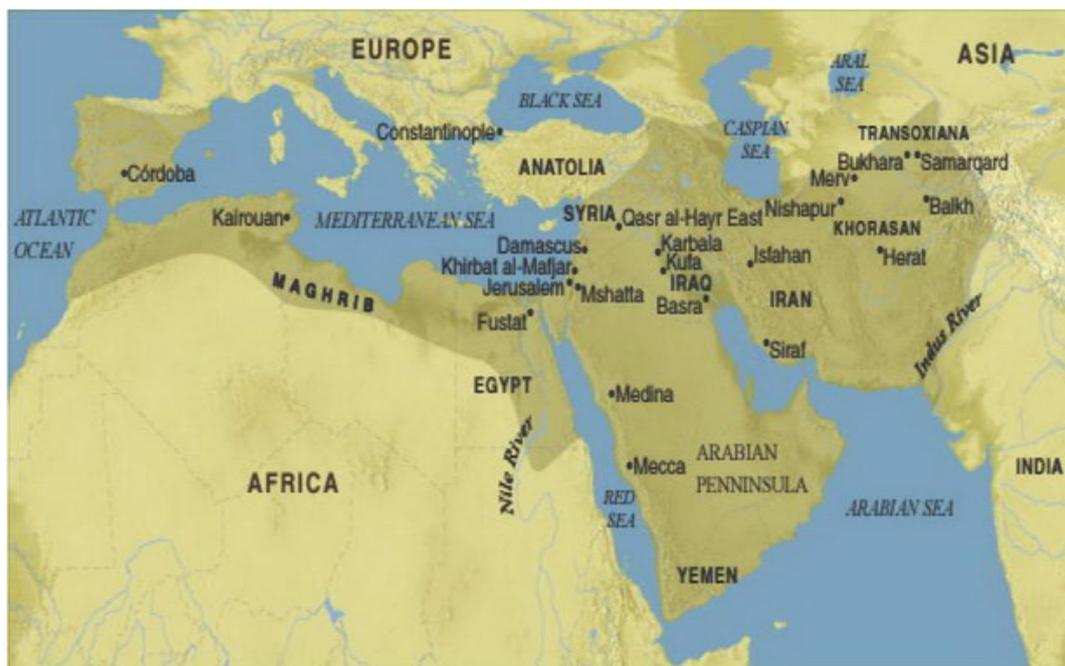
Khulafaur Rasyidin, selain menggunakan gelar *khalifah*, ada yang memakai gelar *amir* yang mengandung makna pemegang kekuasaan yang benar-benar memerintahkan seluruh sektor masyarakat Muslim. Gelar ini dipakai oleh Umar bin Khattab, khalifah yang menggantikan kedudukan Abu Bakar Shiddiq. Selain *amir*, ada juga yang memakai gelar *imam* yang berarti pengarah kaum muslim baik untuk urusan ukhrowi maupun untuk urusan duniawi. Gelar ini dipakai oleh Ali bin Abi Thalib, khalifah yang menggantikan kedudukan khalifah Utsman bin Affan. Jadi, gelar *khalifah*, *amir*, dan *imam* merupakan gelar-gelar terpenting para khalifah yang masuk ke dalam golongan *khulafaur rasyidin*.¹¹ Meskipun demikian, gelar *amir* dan *imam* yang melengkapi gelar jabatan *khalifah* menunjukkan bahwa seorang khalifah memiliki kekuasaan di bidang keagamaan.

Berbeda dengan sistem kerajaan, kekuasaan negara diwariskan secara turun temurun, meskipun dari substansinya tidaklah berbeda. Baik pada sistem kekhalifahan maupun kerajaan, penguasa memakai gelar sebagai khalifah meskipun dalam perkembangannya ada juga yang memakai gelar sultan. Sementara itu, wilayah kekuasaannya tidak berada dalam satu kekuasaan melainkan pernah juga berdiri dua kekhalifahan. Hal tersebut terjadi karena kekuasaan yang dimiliki oleh khalifah lebih cenderung bergeser ke arah kekuasaan keduniawian. Nah, dari fenomena tersebut, mudahlah dipahami kalau sebagian ahli berpendapat bahwa sistem kerajaan berbeda dengan sistem kekhalifahan. Bahkan 'Abul A'la al-Maududi dengan tegas membentangkan garis

¹¹ 'Abdul Mun'im Majib. *Ibid.* Hlm. 17.

merah antara sistem kekhalifahan dan sistem kenegaraan.¹² Kekhalifahan maupun kerajaan, sebagai sistem kenegaraan memiliki kelengkapan atau lembaga yang akan mengatur kehidupan masyarakat. Beberapa lembaga negara itu antara lain kementerian, pemerintahan daerah, militer, urusan keuangan, lembaga hukum, kantor pos, dan sebagainya. Lembaga-lembaga itu didirikan untuk mempermudah urusan keagamaan dan urusan kenegaraan.

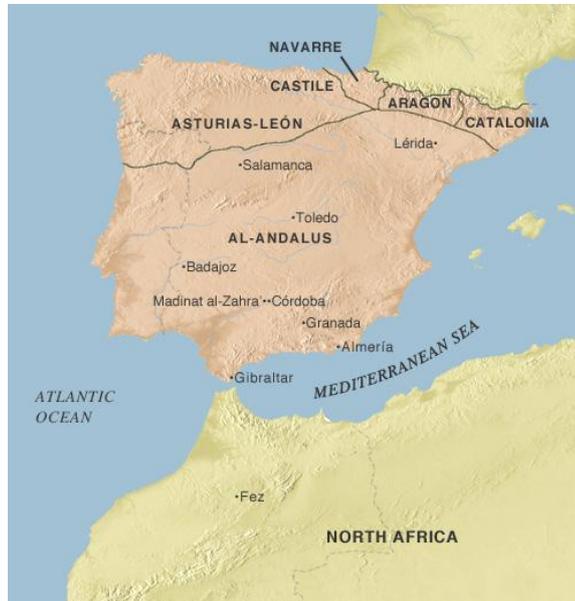
Gambar 1: Wilayah Kekuasaan Dinasti Umayyah, Tahun 661-750¹³



¹² Mengenai perbedaan antara sistem kekhalifahan dan sistem kerajaan, baca lebih lanjut Abul A'la al-Maududi. 1994. *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan.

¹³ Diakses dari <http://www.metmuseum.org/toah/hd>.

Gambar 2: Wilayah Kekuasaan Dinasti Umayyah di Spanyol, Tahun 711-1031¹⁴



Gambar 3: Wilayah Kekuasaan Dinasti Abbasiyah, Tahun 750-1258¹⁵



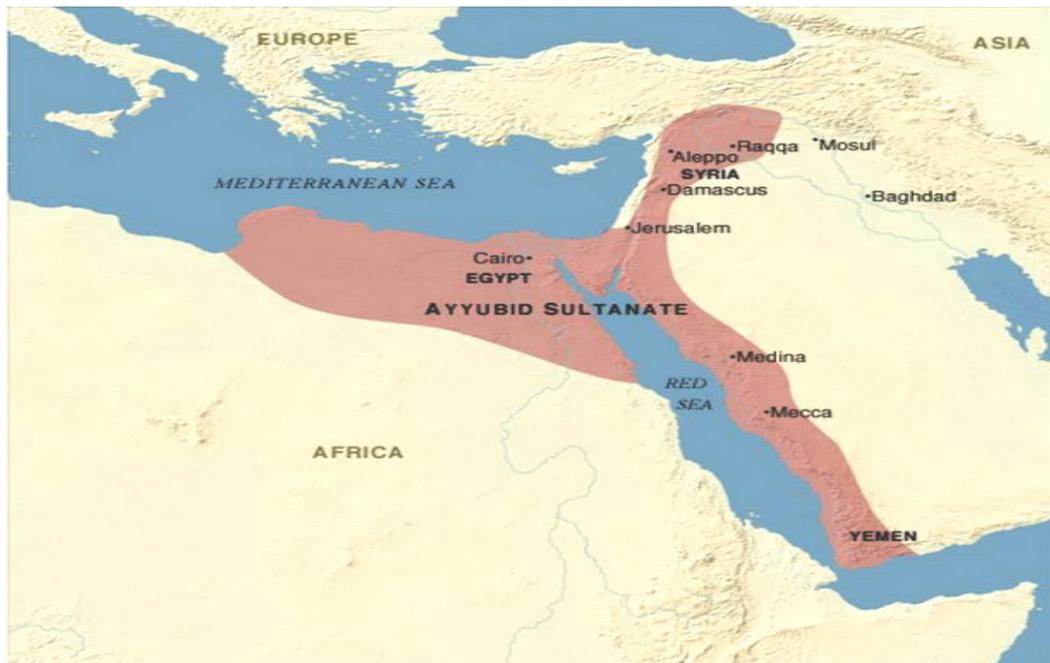
¹⁴ Diakses dari <http://www.metmuseum.org/toah/hd>

¹⁵ Diakses dari <http://www.metmuseum.org/toah/hd>

Gambar 4: Wilayah Kekuasaan Dinasti Fatimiyah, Tahun 909-1171¹⁶



Gambar 5: Wilayah Kekuasaan Dinasti Ayyubiyah, Tahun 1171-1250¹⁷



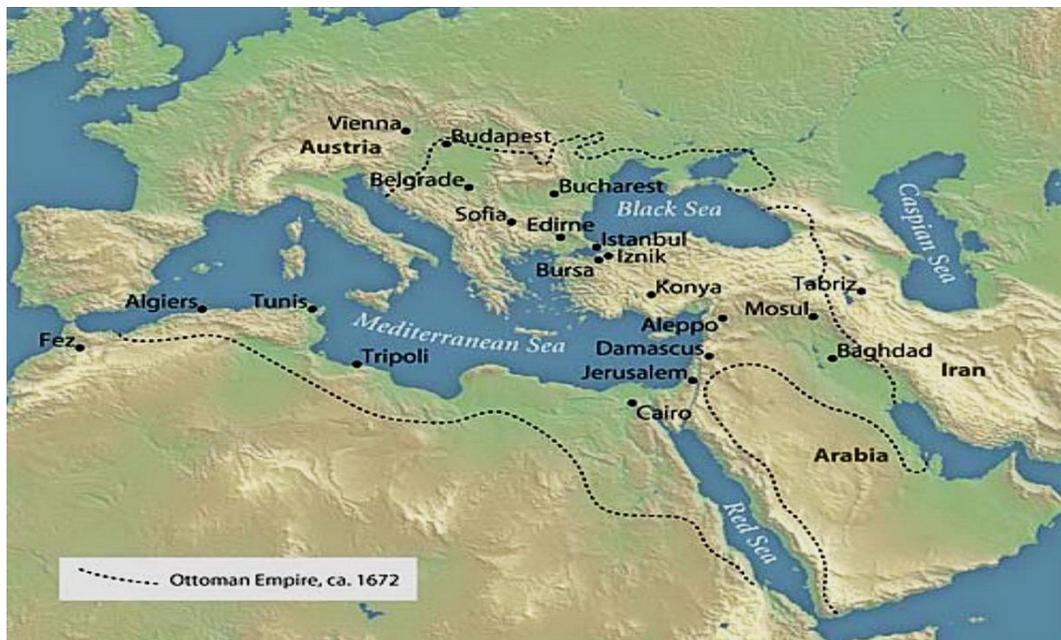
¹⁶ Diakses dari <http://www.metmuseum.org/toah/hd>

¹⁷ Diakses dari <http://www.metmuseum.org/toah/hd>

Gambar 6: Wilayah Kekuasaan Dinasti Mamluk, Tahun 1250-1517¹⁸



Gambar 7: Wilayah Kekuasaan Turki Ottoman, Sekitar Tahun 1672¹⁹



¹⁸ Diakses dari <http://www.metmuseum.org/toah/hd>

¹⁹ Diakses dari <http://www.metmuseum.org/toah/hd>

2. Masyarakat

Kehidupan masyarakat pada masa awal Islam bersifat kompleks karena struktur sosialnya terdiri dari berbagai ras. Meskipun demikian, pada saat itu terdapat dua unsur utama dalam sistem kemasyarakatan yaitu bangsa Arab dan warga sekitar kawasan. Tidak semua bangsa Arab memeluk agama Islam karena ada juga yang memeluk Kristen atau agama lainnya. Bangsa Arab non-muslim yang tinggal di Syiria disebut “orang Arab Nasrani” atau “orang Arab Romawi” sedangkan yang tinggal di Irak disebut *Ibad*.²⁰

Dalam perkembangannya, sebagian besar dari mereka meninggalkan agamanya untuk memeluk Islam sebagai agama barunya. Sementara itu, warga non-Arab yang tidak memeluk Islam dan tidak pernah memeluk Islam tetapi meminta perlindungan kepada penguasa Islam disebut *ra'yat* atau *ahludz dzimah* atau *ahlul kitab*. Meskipun mereka bukan muslim, namun perilakunya diatur oleh para khalifah sesuai dengan syariat Islam, misalnya cara berpakaian.²¹

Ketika Dinasti Abassiyah berkuasa, yang didukung oleh kaum muslim non-Arab, wilayah kekuasaannya disebut *Dar al-Islam*. Penduduknya terdiri dari kaum muslimin dan masyarakat non-muslim. Selain itu, struktur sosial yang berkembang di masyarakat semakin bertingkat sehingga dikenallah beberapa tingkatan di masyarakat, yaitu para penguasa, para ulama, militer, pekerja, petani, dan budak.²² Kenyataan tersebut jelas merupakan suatu perubahan karena pada

²⁰ ‘Abdul Mun’im Majid. *op cit*. Hlm. 53.

²¹ *Ibid*. Hlm. 53.

²² *Ibid*. Hlm. 54-55.

masa Islam awal, tingkatan-tingkatan tersebut tidak dikenal. Jelas hal tersebut sebagai suatu gambaran bahwa kebudayaan yang berkembang di dunia Islam mendapat pengaruh dari kebudayaan luar sehingga terjadi perpaduan kebudayaan.

Struktur sosial seperti yang di gambarkan di atas, membawa dampak pada kehidupan sehari-hari. Tempat tinggal, misalnya, menjadi salah satu simbol status sosial kelompok masyarakat tertentu. Kelompok para penguasa jelas akan bertempat tinggal di rumah megah yang kemudian dikenal dengan sebutan istana. Demikian juga dengan kelompok ulama dan militer menempati rumah yang cukup megah. Hal yang kontras justru terjadi di kalangan masyarakat pekerja dan petani. Mereka tinggal di rumah-rumah sederhana sedangkan kelompok budak tinggal di bagian tertentu rumah tuannya.

Gambar 8: Pintu Gerbang Istana Turki Ottoman di Istanbul, Tahun 1853²³



²³ Diakses dari <http://www.metmuseum.org/toah/hd>

3. Peradaban

Peradaban memiliki beragama makna, antara lain upaya manusia untuk mempertahankan pengetahuan. Selain itu, ada juga yang mengartikan peradaban sebagai pengetahuan dan upaya manusia untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mempercantik kecemerlangan kehidupan. Terakhir, ada juga yang mendefinisikan peradaban sebagai segala sesuatu yang dilakukan manusia di bidang ilmu, kesusasteraan dan seni, serta tingkat intelektual yang dicapai oleh manusia. Pertanyaannya adalah bisakah peradaban Islam didefinisikan? Jika dalam istilah peradaban disematkan kata Islam, maka artinya menjadi berbagai pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan oleh kaum muslimin baik kebudayaan yang diciptakan oleh kaum muslimin maupun kebudayaan yang diambil sebelum Islam lahir.²⁴

Meskipun masyarakat Islam terbagi ke dalam beberapa kelompok, namun dalam kehidupan sehari-harinya mereka memiliki pusat kegiatan bersama, yaitu masjid. Bagi masyarakat Islam, masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat melaksanakan ritual keagamaan saja, namun juga memiliki fungsi sosial, budaya, dan politik. Bahkan lebih jauh lagi, masjid bisa dijadikan sebagai salah satu barometer bagi perkembangan peradaban Islam karena di dalamnya menyangkut perkembangan seni arsitektur. Al-Quran hanya memerintahkan untuk membangun masjid, tetapi tidak mengatur bagaimana masjid harus dibangun kecuali harus menghadap ke ka'bah sebagai kiblatnya. Dengan demikian, masalah ukuran, arsitektur, bahan-bahannya, dan sebagainya tidak

²⁴ *Ibid.* Hlm. 96.

diatur Al-Quran. Oleh karena itu, berbagai masjid yang dibangun oleh berbagai kalangan umat Islam menunjukkan keanekaragaman yang menunjukkan tingkat peradaban Islam lengkap dengan berbagai simbol dan maknanya.

Aspek lain dari peradaban Islam lainnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Meskipun ilmu yang berkembang di kita dipandang bersumber dari Barat, namun sejarah membuktikan bahwa beberapa dasar keilmuan yang berkembang di Barat justru berasal dari para ilmuwan muslim. Ilmu kedokteran, misalnya, dikembangkan pertama kalinya oleh Ibnu Sina yang di kalangan Barat dikenal dengan nama Avicenna. Di bidang kimia, fisika, astronomi, matematika, dan sebagainya, para ilmuwan muslim pun memberikan sumbangan cukup besar sehingga bangsa Barat dapat mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Tidak kalah penting dengan perkembangan ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, qiraat, hadits, fiqh, kalam, tassawuf, sastra, dan sejarah berkembang cukup pesat sehingga dapat mengimbangi perkembangan teologi, filsafat, sastra, dan sejarah yang berkembang di dunia Barat.

Penutup

Dari uraian ringkas, tidak ditemukan suatu uraian mengenai riwayat perjuangan para Nabi dalam upayanya menyebarluaskan agama. Perjuangan mereka lebih tepat dimasukkan ke dalam materi sejarah Islam bukan sejarah kebudayaan Islam. Karena bukankah agama Islam sebagai wahyu yang tidak diciptakan oleh manusia? Sementara kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa, dan karya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Gambar 9: Masjidil Haram di Mekkah



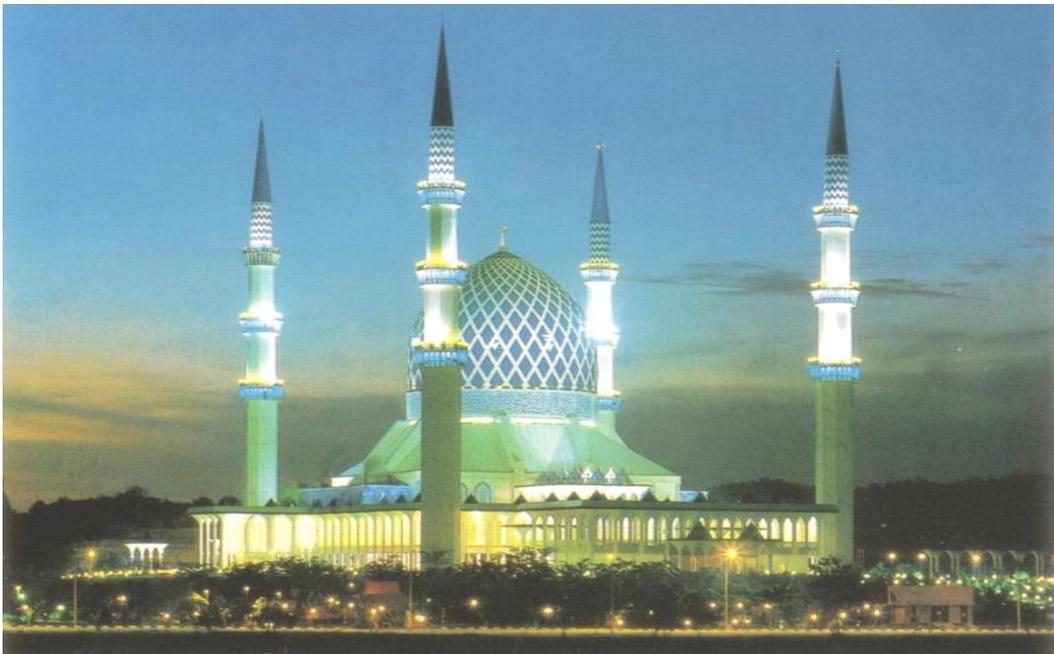
Gambar 10: Masjidil Nabawi di Madinah



Gambar 11: Masjid Istiqlal di Jakarta



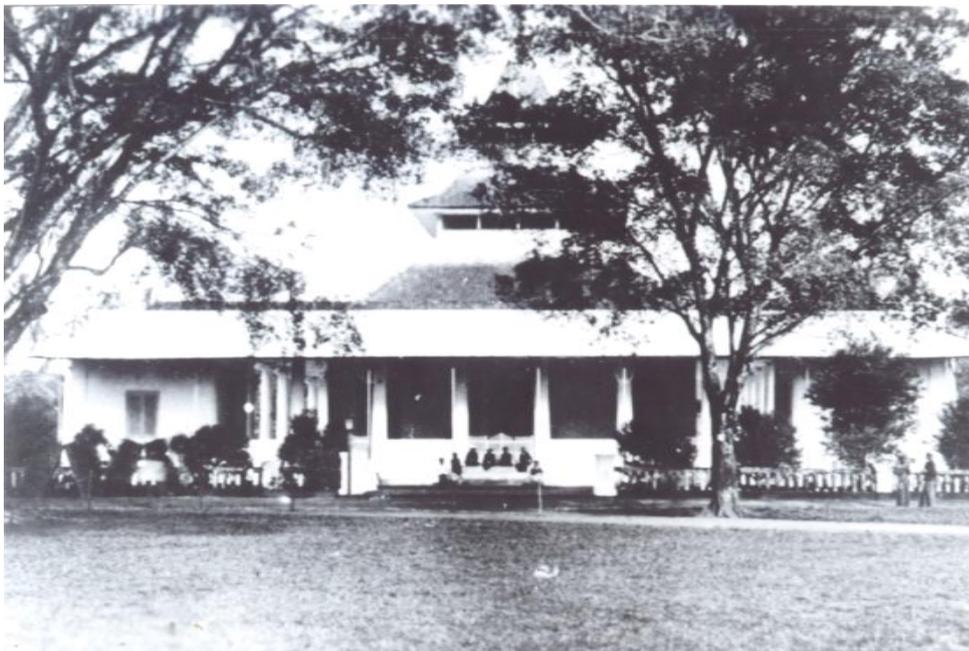
Gambar 12: Masjid di Malaysia



Gambar 13: Masjid Raya Banda Aceh



Gambar 14: Masjid Agung Tasikmalaya, Tahun 1923²⁵



²⁵ Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0802/041. Jakarta: Arsip Nasional RI

Gambar 15: Masjid Agung Tasikmalaya, Tahun 2008

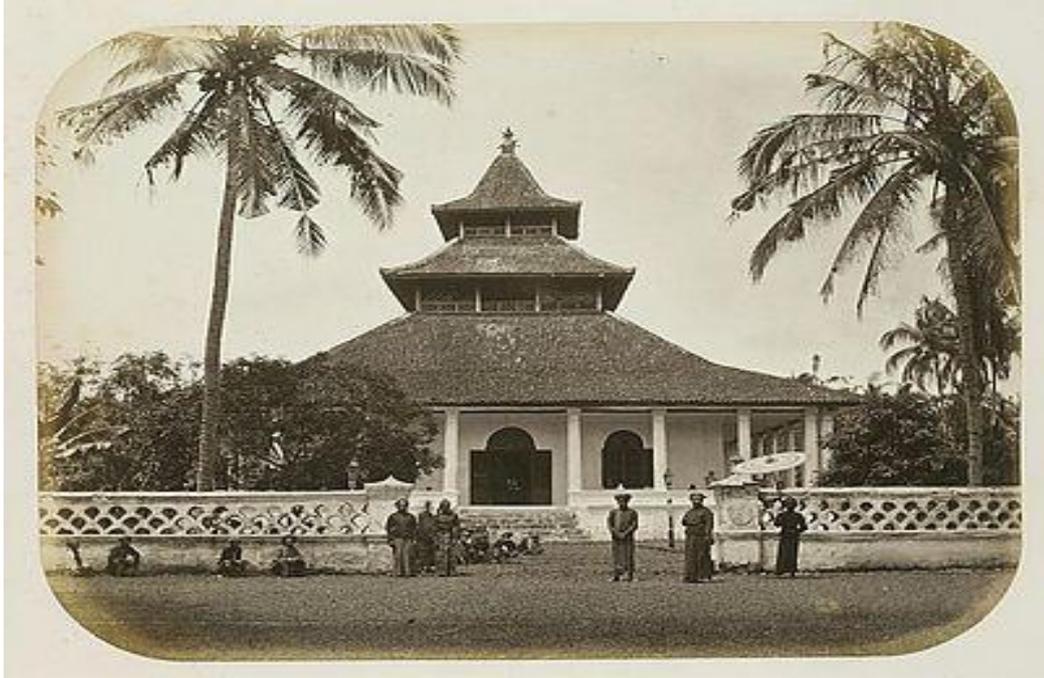


Gambar 16: Masjid Agung Cianjur, Tahun 1880²⁶



²⁶ Foto 16-20 diakses dari <http://kitlv.pictura-dp.nl/>

Gambar 17: Masjid Agung Manonjaya, Tahun 1880



Gambar 18: Masjid Agung Sumedang, Tahun 1880



Gambar 19: Masjid Agung Garut, Tahun 1880



Gambar 20: Masjid Agung Bandung, Tahun 1880



DAFTAR SUMBER

Arsip dan Buku

- Abdullah, Taufik dan Abdurrahman Surjomihardjo (eds.). 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Ali, Mohammad. 1963. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- al-Maududi, Abul A'la. 1994. *Khilafah dan Kerajaan; Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Data Informasi Arsip Foto. Koleksi KIT Wilayah Jawa Barat. No. Inventaris. 0802/041. Jakarta: Arsip Nasional RI.
- Gazalba, Sidi. 1981. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bhratara.
- Hariyono. 1995. *Mempelajari Sejarah secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Ibn Khaldun. 1986. *Mukaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Majib, 'Abdul Mun'im. 1997. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Terj. Ahmad Rofi' Usmani. Bandung: Pustaka.
- Muchsin, Misri A.. 2002. *Filsafat Sejarah dalam Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Shiddiqie, Nouruzzaman. 1983. *Pengantar Sejarah Muslim*. Yogyakarta: Nurcahaya.
- van Peursen, C. A. 1988. *Strategi Kebudayaan*. Terj. Dick Hartoko. Yogyakarta: Kanisius.

Situs Internet

- <http://kitlv.pictura-dp.nl/>
<http://www.metmuseum.org/toah/hd>